



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 - 2021**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Balitbang.....	7
2.2 Sumber Daya Balitbang.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Balitbang	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbang.....	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbang	19
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali.....	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbang.....	46
4.2 Strategi dan Kebijakan	48
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	50
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
BABVII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah dan Kualifikasi PNS Balitbang Kabupaten Badung	12
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Balitbang Kabupaten Badung	13
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbang Kabupaten Badung	16
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbang Kabupaten Badung	17
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJM Balitbang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah Terpilih.....	22
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbang Kabupaten Badung	47
Tabel 4.2 Rencana Strategis Balitbang Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	49
Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Balitbang Kabupaten Badung	51
Tabel 5.3 Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Balitbang Kabupaten Badung	57
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Balitbang Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	59



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5767 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung wajib melakukan penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
 - c. bahwa Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

19. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

UNIT 15 LANTAI 3

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI - BADUNG TELP. (0361) 9009255 FAX. (0361) 9009255
MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5767/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5767/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 September 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN
BADUNG,



I WAYAN SUAMBARA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631025 198810 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5767 / 03 / HK / 2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Keberadaan kelembagaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi daerah dan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan, Hal tersebut menuntut kehadiran kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan seyogyanya merupakan kebijakan yang telah didasari atas

pertimbangan yang rasional, matang, dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis tersebut, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan pembangunan daerah.

Dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

“Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek”. Dalam kapasitas ini, Pasal 21 Ayat (40), kembali ditegaskan bahwa : “Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja Pemerintah Daerah”.

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan di daerah dan harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang seyogyanya merupakan kebijakan yang benar-benar telah didasari atas pertimbangan input yang rasional, matang dan akurat. Konsekuensi logis dari hal ini, sangatlah tepat untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan strategis tersebut.

Selain itu, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing (UU-No. 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 D). Untuk meningkatkan daya saing daerah maka salah satu aspek yang perlu di kembangkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan harapan kemajuan IPTEK di daerah akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha produktif di daerah

Penguatan terhadap lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung perlu dilakukan mengingat perannya yang vital sebagai “think tank” Bupati dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007. Selain itu, reorientasi terhadap program kelitbangan ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban bisa dijalankan dengan baik dan benar. Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung juga berkaitan dengan

pengembangan dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan hasil-hasil kelitbang di kalangan masyarakat.

Amanat ini mengisyaratkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk mengemban tugas dan fungsi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pendayagunaan Iptek dan pemanfaatan hasil-hasil litbang tersebut secara aktif. Dengan demikian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan yaitu penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Ekonomi dan Keuangan; penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi; penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Pemerintahan; penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Kemasyarakatan; dan pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dan pengembangan dipakai sebagai rumusan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis implementatif oleh Bupati (Pemerintah Daerah) serta pengembangan dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kalangan masyarakat.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan 2016 - 2021 ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan dan merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis oleh Kepala Daerah, serta bagi pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung, dan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja Balitbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG KABUPATEN BADUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung No. 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, ekonomi dan Pemerintahan; serta Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan;

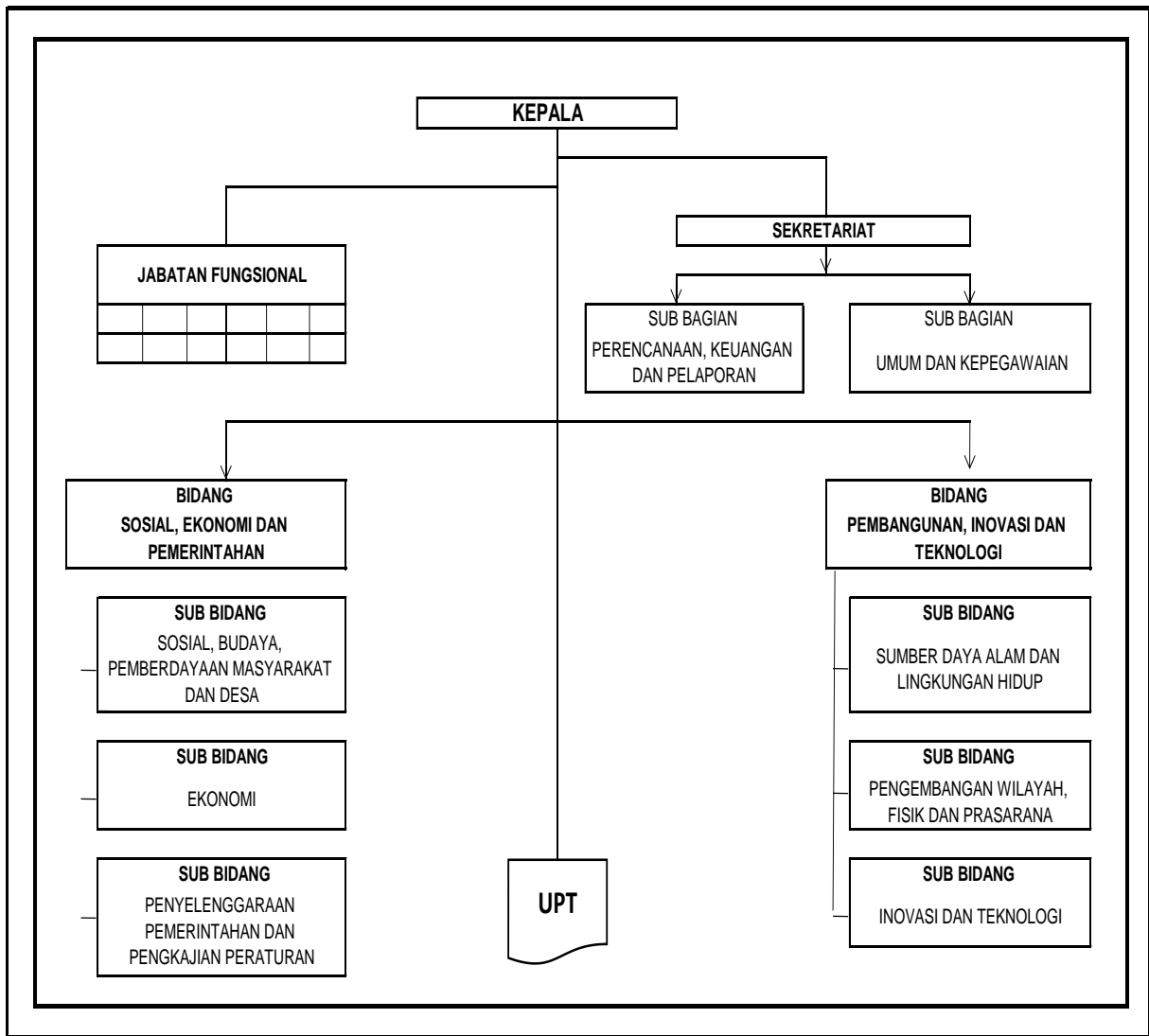
c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung maka Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung terdiri atas:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
 - a. Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Kepala Sub Bidang Ekonomi

- c. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 4) Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi
 - a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
 - c. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Gambar 1
Struktur Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kerja Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. menyusun kebijaksanaan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;

- c. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan instansi/ lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang di pemerintah kabupaten;
- d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah Kabupaten
- e. memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- i. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran Badan;
- j. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. mengkoordinasikan, menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik daerah dan pelaporan;
- c. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis dan rencana tahunan badan;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan Badan;
- f. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- h. mengkoordinasikan penyiapan materi evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran Badan;

- i. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 3) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - b. menyiapkan materi penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di Bidang Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - f. melaksanakan Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - i. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- 4) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - b. menyiapkan materi penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - c. menyusun rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g. melaksanakan Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- h. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- j. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2.2. Sumberdaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, dan tentunya kepada Bupati Badung dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung didukung oleh keberadaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

Di bawah diuraikan kedua hal tersebut, sebagai berikut:

1. Pegawai (sumberdaya manusia)

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan secara prosedural, demikian juga untuk mendukung pencapaian hasil- hasil kelitbangan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah dan Kualifikasi PNS
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SAR. MUD	DIPL OMA	SMA	SMP		SD
1	Ka.Balitbang		1			1				1							1
2	Sekretaris Bappeda Litbang			1		1				1							1
	a Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				1		1				1						1
	b Kasubag Umum dan Kepegawaian				1		1				1						1
	c Staf						3	6			3			6			9
3	Kabid.Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan			1		1					1						1
	a Kasubid. Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				1		1				1						1
	b Kasubid. Ekonomi				1		1				1						1
	c Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				1		1				1						1
	d Staf					1	1	1			2			1			3
4	Kabid Pembangunan Inovasi dan Teknologi			1		1				1							1
	a Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				1	1				1							1
	b Kasubid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana				1		1				1						1
	c Kasubid Inovasi dan Teknologi				1		1				1						1
	d Staf						3	1			3			1			4
	Jumlah	0	1	3	8	6	14	8	0	4	16	0	0	8	0	0	28

2. Peralatan, Sarana dan Prasarana

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, telah memiliki peralatan, sarana dan prasarana relatif cukup memadai. Daftar peralatan, sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mobil Station Wagon	6	X		
2	Sepeda Motor	2	X		
3	Komputer	20	X		
4	Printer	20	X		
5	Laptop	17	X		
6	UPS	10	X		
7	Rak Kayu	1	X		
8	Filling Kabinet Besi	2	X		
9	Rak Besi arsip	1	X		
10	Lemari kayu	8	X		
11	Papan Pengumuman	1	X		
12	Mesin Absensi	1	X		
13	Overhead Projektor/LCD	2	X		
14	Overhead Projektor/LCD	2		X	
15	Kursi Rapat	29	X		
16	Meja Piket	1	X		
19	AC Kaset	4	X		
20	AC Split	15	X		
21	Televisi	5	X		
22	Wireless	1	X		
23	Dispenser	4	X		
24	Alat pemanas air	4	X		
25	Penyaring udara	1	X		
26	Hardisk Eksternal	5	X		
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	X		
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	X		
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	X		
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	X		
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	X		
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	X		
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	X		
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18	X		
35	Camera Film	2	X		
36	Telephone (PABX)	12	X		
37	Pesawat Telephone	2	X		
38	Facsimile	1		X	

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Sebagai Perangkat daerah yang baru terbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan belum memiliki kinerja Pelayanan karena fungsi fungsi kelitbangannya sebelumnya dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung.

Adapun program dan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung tahun 2010 - 2015 dan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2016 telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

Tahun 2010:

1. Penyusunan Rencana Investasi dan Evaluasi Program Drainase pada
2. Penyusunan Rencana Investasi dan Evaluasi Program Jalan
3. Penyusunan Rencana Investasi dan Evaluasi Program Irigasi
4. Identifikasi Lapangan Beberapa Komoditi Unggulan Pertanian Untuk Rekomendasi Peningkatan Produksi Berkelanjutan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
5. Pemutakhiran Database Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Tahun 2011:

1. Kajian Penetapan Lokasi Pembangunan Pasar Seni di Kabupaten Badung
2. Dampak Bantuan Penguatan Modal Terhadap Peningkatan Taraf Perekonomian Petani di Kabupaten Badung

Tahun 2012:

1. Dampak Implementasi Bantuan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Badung
2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Badung
3. Dampak Pembukaan Toko Modern Terhadap Perkembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung
4. Kajian Peran Perempuan Dalam Pelestarian Nilai - Nilai Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung
5. Kajian Terhadap Identifikasi Potensi Ekonomi Kerakyatan dan Pola Pemberdayaan Usaha Mikro dan Industri Keluarga di Kabupaten Badung
6. Penyusunan Rencana Investasi dan Evaluasi Program Irigasi
7. Kajian Terhadap Peran LPD dan Koperasi Simpan Pinjam dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung

Tahun 2013:

1. Kajian Produk Unggulan Dalam Meningkatkan Ekspor UKM dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Badung
2. Kajian Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan
3. Penyusunan Indikator Sosial Kabupaten Badung
4. Penyusunan Tinjauan Perekonomian Kecamatan Kabupaten Badung
5. Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Badung
6. Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Badung

Tahun 2014:

1. Penyusunan Indikator Ekonomi Triwulan Kabupaten Badung

Tahun 2015:

1. Kajian dan Pembuatan Rencana Umum dan Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Badung
2. Penyusunan Profil Daerah dan Data Mini Kabupaten Badung

Tahun 2016:

1. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pantai Pandawa
2. Penyusunan Kajian Akademis Ranperda RDTR Desa Wisata di Kabupaten Badung

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung :

1. Tantangan

- a. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
- b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.
- c. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2. Peluang

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD.
- b. Sebagai koordinator penelitian dan pengembangan akan mempermudah kerjasama, baik di daerah, antar provinsi maupun dengan pusat.
- c. Adanya Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) sangat menunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan di daerah;
- d. Adanya kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi setempat, dan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat Pusat (Badan Litbang Hukum dan HAM, Badan Litbang Pertanian, Badan Riset Kelautan dan Perikanan);
- e. Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi yang menuntut diperlukannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
- f. Adanya Kesadaran perlunya litbang dalam menentukan kebijakan daerah dan dalam pengembangan potensi daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	jumlah inovasi dan pembangunan IPTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dikembangkan																		
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prosentase kehadiran pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prosentasi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	jumlah inovasi dan pembangunan IPTEK yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prosentase kehadiran pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prosentasi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG

Isu-isu strategis diartikan sebagai permasalahan aktual, krusial atau penting yang dihadapi yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Sebagai Perangkat Daerah yang baru dibentuk untuk menangani penelitian dan pengembangan, maka ruang lingkup yang ditangani bersifat lintas sektoral dan satu dengan yang lain dapat saling berkaitan.

Permasalahan yang berkaitan dengan analisis gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan dan analisis isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Dari kedua analisis ini diharapkan dapat mewakili permasalahan yang dihadapi dan yang akan dicarikan jalan keluarnya bagi pembangunan daerah. Tujuan dari dimunculkan isu-isu strategis ini untuk mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam pelayanan publik.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Badung;

1. Beberapa permasalahan terkait dengan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Badung :
 - a. Rekomendasi hasil penelitian tidak selalu dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah pengguna hasil penelitian;
 - b. Hasil penelitian masih belum optimal hasilnya atau belum implementatif;
 - c. Perangkat Daerah pengguna hasil penelitian memiliki agenda yang berbeda dengan rekomendasi hasil penelitian.
2. Sumber daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
Beberapa permasalahan terkait dengan Sumber daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya:
 - a. Tenaga fungsional peneliti belum tersedia dan tenaga pendukung administratif masih terbatas
 - b. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal
3. Capaian kinerja yang belum dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung periode sebelumnya

Beberapa permasalahan terkait dengan Capaian kinerja yang belum dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung periode sebelumnya adalah karena masih bergabungnya tugas kelitbang dengan Perangkat Daerah Bappeda Litbang

4. Beberapa hambatan dan permasalahan terkait dengan Capaian kinerja antara Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dengan RPJMD periode sebelumnya yang perlu diantisipasi yaitu :
 - a. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
 - b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.
 - c. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
 - d. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan jangka menengah Bupati Badung Tahun 2016-2021 adalah :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 9 (sembilan) misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari Tri Hita Karana yaitu :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung memberikan kontribusi terhadap 4 misi dari 9 misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain keempat misi tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tentunya juga dituntut untuk ikut serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance dan clean government* sesuai dengan Misi 3 Pemerintah Daerah yaitu : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance dan clean government*

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Badung telah merancang prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Berikut beberapa prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, sebagai berikut.

A. Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan tupoksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung;

1. Memprioritaskan program dan anggaran dalam APBD yang mendukung penguatan pembangunan agama, adat, tradisi, seni dan budaya untuk membentuk jati diri, harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Badung.

2. Memprioritaskan program dan anggaran dalam APBD yang mendukung penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar rakyat yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan rasa aman.
3. Memprioritaskan program dan anggaran dalam APBD yang mendukung penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu dan daya saing pendidikan.
4. Memprioritaskan program dan anggaran dalam APBD yang mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah untuk rakyat.
5. Memprioritaskan program dan anggaran dalam APBD yang mendukung pemantapan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJM Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran / Utama	PPNSB
Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama				
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta Penguatan kehidupan adat dan budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Adat, Agama dan Budaya
Misi 6: Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
Misi 2: Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi				
Terwujudnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kepuasan masyarakat thd. pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	
Misi 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan				
Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	
	Indeks kebahagiaan	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 sesuai tupoksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung;

- Misi 1 (satu) : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
- Strategi : Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat
- Arah Kebijakan : Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.
- Misi 2 (dua) : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
- Strategi : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik.
d. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi.
- Arah Kebijakan : a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
b. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi.
- Misi 4 (empat) : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan
- Strategi : a. Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia
b. Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat
- Arah Kebijakan : a. Meningkatkan akses pembangunan manusia yang berkualitas
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup
- Misi 6 (enam) : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Strategi : Memasyarakatkan kesetaraan gender
- Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan

3.3. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI dan Renstra SKPD Provinsi Bali

Pembangunan daerah adalah merupakan sub sistem dari Pembangunan Nasional oleh karena itulah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Kementerian / lembaga (Rensra

K/L) dan Rencana Strategis Daerah 2016-2021. Sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbang ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbang tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 35, sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 35, sebagai berikut :

1. Badan Litbang Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota.
2. Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. penataan daerah;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. perangkat daerah
 - e. produk hukum daerah
 - f. pembangunan daerah
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. keuangan daerah
 - i. pengelolaan badan usaha daerah
 - j. pelayanan publik
 - k. partisipasi masyarakat
 - l. penyelenggaraan perkotaan
 - m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara
 - n. kerjasama daerah
 - o. pemerintahan desa
 - p. pengelolaan inovasi daerah
 - q. manajemen sistem informasi daerah
 - r. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - s. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - t. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
 - u. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; serta
 - v. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan Provinsi, kabupaten/kota.

Dalam Pasal 36 Permendagri No 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Provinsi, kabupaten/kota memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota.
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota.
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.
- n. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Tujuan dari kegiatan alih teknologi adalah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan:

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;

- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan- an berkelanjutanutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/ hutan	Permasalah ahan Sampah	Degradasi i Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1 Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1 Pembangunan jalan 2 Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3 Pembangunan drainase 4 Pembangunan sarana / prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2 Percepatan Pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	0	1	0	1 Pembangunan jalan 2 Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3 Pembangunan drainase 4 Pembangunan sarana / prasarana pengelolaan limbah dan sampah

Isu Strategis Pembangunan- an berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/ hutan	Permasalah- an Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
3 Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1 Pembangunan jalan 2 Pembangunan pusat perda- gangan dan jasa 3 Pembangunan drainase 4 Pembangunan sarana / prasarana pengelolaan limbah dan sampah
4 Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1 Pembangunan terminal 2 Pembangunan Pasar
5 Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	Pengembangan kawasan
6 Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1 Pembangunan jalan 2 Pengembangan kawasan
7 Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	Pengembangan kawasan
8 Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9 Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1 Perluasan permukiman 2 Pembangunan jalan
10 Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1 Pembangunan jalan 2 Pembangunan akomodasi wisata
11 Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1 Pembangunan jalan 2 Pengembangan pasar
12 Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1 Pengembangan permukiman 2 Pembangunan jalan
14 Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan paying hokum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
Pengembang- an kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan paying hokum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitar-nya

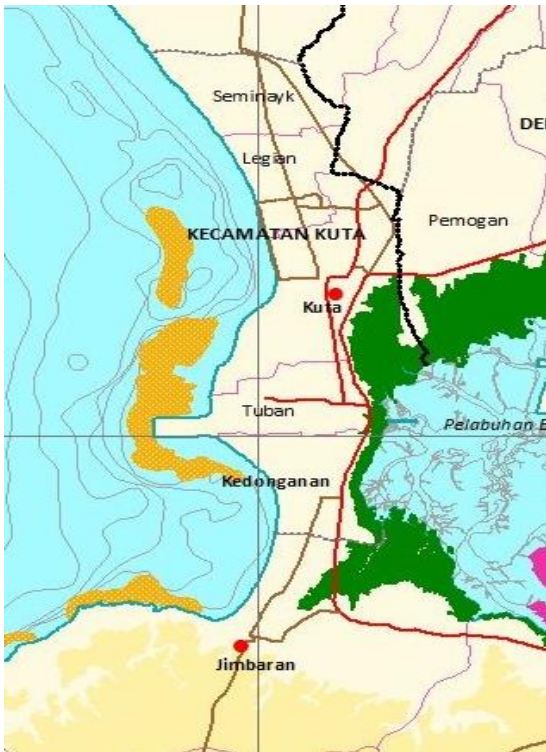
Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekosistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut:

Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1 Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2 Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3 Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4 Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif		
1 Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan 2 Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.		

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



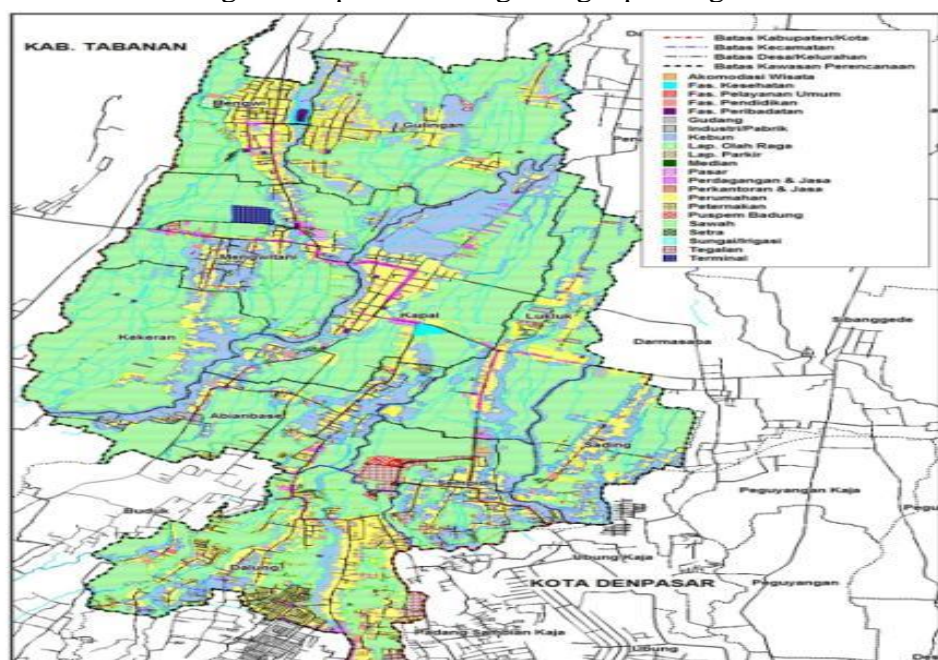
Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<div>1 Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran.</div> <div>2 Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman</div> <div>3 Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya</div> <div>4 Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</div>	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif		
<div>1 Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan</div> <div>2 Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.</div>		

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline :	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	<p>1 Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif</p> <p>2 Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang</p> <p>3 Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya</p> <p>4 Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.</p>	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH
Pengaruh kumulatif		
<p>1 Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintaahn dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir</p> <p>2 Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.</p>		

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<div>1 Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gannguan kesehatan manusia</div> <div>2 Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas</div> <div>3 Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir</div> <div>4 Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</div>	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif		
<div>1 Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak</div> <div>2 Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir</div>		

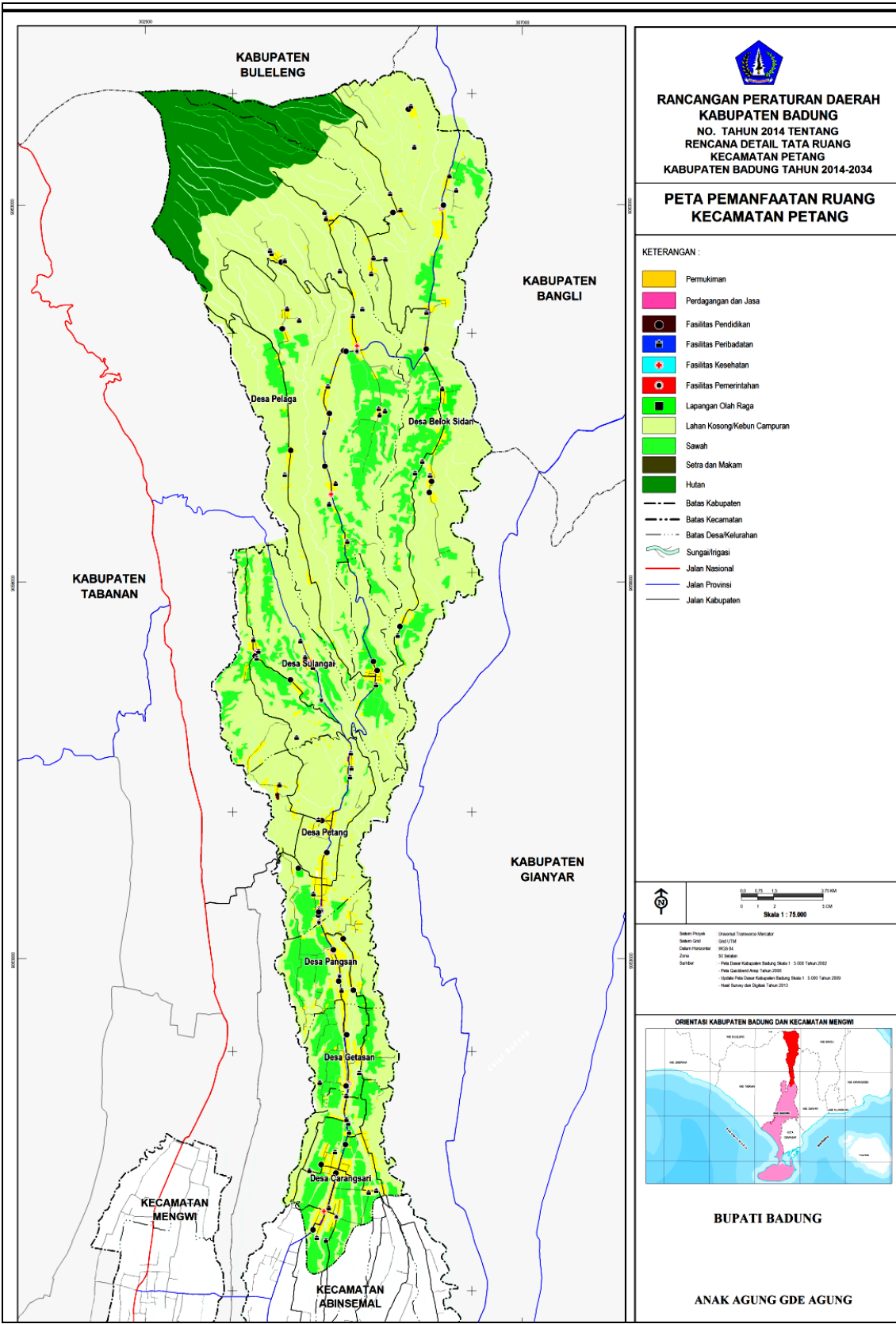
Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan	<div>1 Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif</div> <div>2 Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan</div> <div>3 Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Canggu – Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan –Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya</div> <div>4 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan</div>	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau
Pengaruh kumulatif		
<div>1 Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas</div> <div>2 Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan.</div>		

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa	1 Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2 Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3 lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya 4 Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau
Pengaruh kumulatif		
1 Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas 2 Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada social kemasyrakatan.		

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai			
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		<div>1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan.</div> <div>2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar.</div> <div>3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya</div> <div>4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</div>	<div>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.</div>
Pengaruh kumulatif			
<div>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan.</div> <div>2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.</div>			

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Masalah Sampah			
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM		<ol style="list-style-type: none">1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan.2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar.3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none">1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan.2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.			

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran air dan Masalah Sampah			
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan		<div>1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai</div> <div>2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar.</div> <div>3. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi.</div> <div>4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</div>	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).
Pengaruh kumulatif			
<div>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.</div> <div>4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.</div>			

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<div>1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya</div> <div>2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau</div> <div>3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</div> <div>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</div>	<div>1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/daya tampungnya</div> <div>2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif</div> <div>3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</div> <div>4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</div>	<div>1. Pembatasan /pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan</div> <div>2. penetapan ruang terbuka hijau</div>
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<div>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</div> <div>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</div> <div>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</div> <div>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</div>	<div>1. Penetapan sawah abadi.</div> <div>2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</div> <div>3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga,perumahan dan kegiatan usaha</div> <div>4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</div>	<div>1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan</div>
3	Pengembangan Agropolitan	<div>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</div> <div>2. Dampak terhadap</div>	<div>1.Penetapan kawasan pertanian dan permukiman</div>	<div>1.peningkatan kesejahteraan petani</div>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
		<p>pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi.</p> <p>4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif</p>	<p>terbatas</p> <p>2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2. Pengembangan pertanian organik</p>
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak</p>	<p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL.</p>	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak.</p> <p>4. Dampak pencemaran lingkungan</p> <p>5. Dampak sosial-kemasyarakatan</p>	<p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.</p> <p>3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan</p> <p>4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.</p>	1. penetapan kawasan industri khusus
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	<p>1. Dampak terhadap pencemaran pantai.</p> <p>2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya</p> <p>3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.</p>	<p>1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai.</p> <p>2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan</p>	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
			kawasan 3. Pembangunan infrastruktur; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rkomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13
 Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
 Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarak	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan	1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbang kan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		atan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta	kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama		
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah	1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah	1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan	Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3	Pengembangan Agropolitan	1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi	1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani	1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. pengembangan pertanian organik	Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif			
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	1. penetapan kawasan industri khusus	Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. mendorong masyarakat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya .	menjaga kebersihan kawasan 3.pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4.Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat		pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang kelitbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok : membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan dengan menetapkan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun Kebijaksanaan Teknis Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan daerah
- 2) Melaksanakan Pengkajian Kebijakan Lingkup Urusan Pemerintah Daerah
- 3) Memfasilitasi dan Melaksanakan Inovasi Daerah
- 4) Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menetapkan beberapa tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tujuan	: Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis kelitbangan
Sasaran 1	: Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan
Indikator Kinerja	: Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Sasaran 2	: Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK
Indikator Kinerja	: jumlah inovasi dan pembangunan IPTEK yang dikembangkan
Sasaran 3	: Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel
Indikator Kinerja	: <ol style="list-style-type: none">1. Nilai Akuntabilitas Kinerja2. Prosentase kehadiran pegawai3. Prosentase temuan hasil pemeriksaaan internal/ eksternal yang ditindaklanjuti4. Prosentasi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung5. Prosentase barang milik daerah yang terpelihara

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang kelitbangan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sebagai berikut :

- Strategi : 1. Fasilitasi penyusunan Rencana Induk dan Rencana Kerja Kelitbangan
2. Fasilitasi penyediaan dan penguatan SDM kelitbangan khususnya aparat fungsional peneliti
3. Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan
4. Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sinergitas kelitbangan
7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan
8. Peningkatan kualitas layanan administrasi kelitbangan
- Kebijakan : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis Kelitbangan	1 Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	50,5%	55%	60%	65%	70%
		2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK	jumlah inovasi dan pembangunan IPTEK yang dikembangkan	2	4	6	8	10
		3 Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,8	78	80.05	80.10
			2 Prosentase kehadiran Pegawai	100	100	100	100	100
			3 Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			4 Prosentasi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung	80.00	82.00	83.00	84.00	85.00
			5 Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100

Tabel 4.2
Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis Kelitbangan	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	83,5%	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	
		10	2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK	jumlah inovasi dan pembangunan IPTEK yang dikembangkan	Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	
		80,1%	3 Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 2 Prosentase kehadiran Pegawai 3 Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 4 Prosentasi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung 5 Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perencanaan dan penganggaran SKPD Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pengembangan data/informasi	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK
3. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Terwujudnya kebijakan pembangunan berbasis Kelitbangan	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel	Prosentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Pegawai	3	04	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
					FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			11,895.37		18,457.90		20,351.75		65,006.22				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			11,895.37		18,457.90		20,351.75		65,006.22				
				01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	0 kegiatan	100 %	1,172.28	100 %	1,337.77	100 %	1,530.61	100 %	6,054.76	Balitbang		
					1	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Materi dan Buku cek	0	500 materi dan 10 buku cek	2.70	500 materi dan 10 buku cek	3.38	500 materi dan 10 buku cek	4.22	2500 materi dan 50 buku cek	15.69	Balitbang	Kab. Badung
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi (jumlah saluran telepon)	0	12 bulan	60.00	12 bulan	66.00	12 bulan	72.60	12 bulan	324.60	Balitbang	Kab. Badung
					3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 dan Roda 2	0	20 Unit	16.50	20 Unit	18.15	21 Unit	20.46	21 Unit	71.51	Balitbang	Kab. Badung
					4	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor	0	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	239.78	Balitbang	Kab. Badung
					5	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	0	1 paket	26.90	1 paket	33.63	1 paket	42.03	1 paket	154.69	Balitbang	Kab. Badung
					6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang cetakan dan penggandaan	0	1 paket	45.91	1 paket	57.39	1 paket	71.73	1 paket	237.28	Balitbang	Kab. Badung
					7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik	0	1 paket	6.83	1 paket	8.54	1 paket	10.67	1 paket	39.77	Balitbang	Kab. Badung
					8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	0	1 paket	6.05	1 paket	7.56	1 paket	9.45	1 paket	48.27	Balitbang	Kab. Badung
					9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	0	1 paket	58.30	1 paket	64.13	1 paket	70.54	1 paket	385.45	Balitbang	Kab. Badung
					10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan Konsumsi Bagi Tamu	0	1 paket	23.71	1 paket	26.08	1 paket	28.69	1 paket	118.19	Balitbang	Kab. Badung
					11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ketersediaan Informasi tentang Kegiatan yang berhubungan dengan kelitbangan	0	1 paket	350.00	1 paket	420.00	1 paket	504.00	1 paket	1799.00	Balitbang	Kab. Badung
12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	jumlah bahan bakar kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat)			0	24720 liter	256.08	24720 liter	281.69	24720 liter	309.86	111828 liter	1266.53	Balitbang	Kab. Badung			
13	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Jumlah Sarana Prasarana Upakara Keagamaan		0	1 paket	32.15	1 paket	35.37	1 paket	38.90	1 paket	173.41	Balitbang	Kab. Badung				
14	Penyediaan Dekorasi	jumlah bahan material untuk dekorasi hari-hari nasional		0	1 paket	51.80	1 paket	56.98	1 paket	62.68	1 paket	235.61	Balitbang	Kab. Badung				
15	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	jumlah pelaksanaan lomba-lomba		0	1 paket	50.00	1 paket	55.00	1 paket	60.50	1 paket	230.47	Balitbang	Kab. Badung				
Terwujudnya kebijakan pembangunan berbasis Kelitbangan	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DA PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	0%	100%	573.80	100%	878.81	100%	1,004.00	100%	4,748.42	Balitbang		
					1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor	0	1 paket	331.50	1 paket	364.65	1 paket	729.30	1 paket	1,820.86	Balitbang	Kab. Badung
					2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0	1 paket	24.00	1 paket	26.40	1 paket	29.04	1 paket	1,431.33	Balitbang	Kab. Badung
					3	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	0	1 unit	3.50	1 unit	5.00	1 unit	5.00	1 unit	20.50	Balitbang	Kab. Badung
4	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan			0	1	24.30	1	26.73	1	29.40	1	104.73	Balitbang	Kab. Badung			

Perubahan Renstra Balitbang Tahun 2016-2021

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021				
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis Kelitbangan	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 2 Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 3 Prosentasi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	kantor yang terpelihara			paket		paket		paket		paket			
					5 Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara	0	1 Paket	16.50	1 Paket	20.63	1 Paket	25.78	1 Paket	92.91	Balitbang	Kab. Badung
					6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	0	20 Unit	114.00	20 Unit	125.40	20 Unit	150.48	20 Unit	592.17	Balitbang	Kab. Badung
					7 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	0	3 Unit	60.00	1 unit	25.00	6 unit	35.00	26 unit	351.00	Balitbang	Kab. Badung
					8 Pembangunan website Balitbang Kabupaten Badung	Terbangunnya website Balitbang Kabupaten Badung	0							1 paket	49.92	Balitbang	Kab. Badung
					9 Penataan Ruang Rapat	Jumlah Ruang Rapat yang ditata	0			1	285.00			1	285.00	Balitbang	Kab. Badung
						Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	0 laporan	78	320.20	80,05	386.85	80,10	467.49	80,10	1,464.17	Balitbang	
					1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya honor satuan pengelola keuangan	0	12 bulan	267.96	12 bulan	321.55	12 bulan	385.86	12 bulan	1458.17	Balitbang	Kab. Badung
					2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah Dokumen yang tersusun	0	4 Dokumen	52.24	4 Dokumen	65.30	4 Dokumen	81.63	4 Dokumen	6.00	Balitbang	Kab. Badung
						Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	0%	83,00%	19.89	84,00%	20.00	85,00%	20.00	85,00%	82.89	Balitbang	
Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis Kelitbangan	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	1 Penyusunan Dokumen Rencana SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	0	3 dokumen	19.89	3 dokumen	20.00	3 dokumen	20.00	3 dokumen	82.89	Balitbang	Kab. Badung
						TERSEDINYA DATA DAN INFORMASI YANG MEMADAI	0%	100%	259.71	100%	290.41	100%	108.49	100%	533.95	Balitbang	
					1 Pembangunan sistem aplikasi kelitbangan	Terbangunnya sistem aplikasi kelitbangan	0			1 paket	200.00						
					2 Penyusunan Buku Profil Balitbang Kabupaten Badung	Tersusunnya Buku Profil Balitbang Kabupaten Badung	0	125 buku	28.54	125 buku	34.25	125 buku	41.10	125 buku	132.44	Balitbang	Kab. Badung
					3 Penyusunan Buletin Kelitbangan Kabupaten Badung	Tersusunnya Buletin Kelitbangan Kabupaten Badung	0	200 buku	46.80	200 buku	56.16	200 buku	67.39	200 buku	217.15	Balitbang	Kab. Badung
					4 Pembuatan Vidio Animasi Balitbang Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 Paket	184.37					1 Paket	184.37	Balitbang	Kab. Badung
						Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	0	60,00%	7,120.94	65,00%	13,986.99	70,00%	15,508.36	70,00%	44,950.27	Balitbang	
					1 Up Date Analisis Standar Belanja	Jumlah Analisis Standar Belanja	-	-	-	-	-	40 jenis ASB	634.05	40 jenis ASB	1,158.06	Balitbang	Kab. Badung
					2 Kajian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	52.46	Balitbang	Kab. Badung
					3 Penelitian Dampak Kegiatan Pariwisata Pada Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata Unggulan di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	149.31	Balitbang	Kab. Badung
					4 Kajian Pembentukan Holding Company di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 buah	248.67	Balitbang	Kab. Badung
					5 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten badung	-	-	-	-	-	-	-	65 buku	275.00	Balitbang	Kab. Badung
					6 Festival Innovation (INOEST) Kabupaten Badung	Terselenggaranya innovation festival (Inofest)	-	-	-	-	-	-	-	3 katagori jenjang pendidikan	135.00	Balitbang	Kab. Badung
					7 Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis Komoditi ayam Ras Petelor di Kec. Petang	Terlaksananya Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis Komoditi ayam Ras Petelor di	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	138.16	Balitbang	Kab. Badung

Perubahan Renstra Balitbang Tahun 2016-2021

Pendanaan Renstra Balitbang Tahun 2016-2021

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta								
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indek Kebahagiaan		8	Study Kelayakan Pengembangan Green House di Kab. Badung	Kec. Petang Terlaksananya Study Kelayakan Pengembangan Green House di Kab. Badung	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	138.16	Balitbang	Kab. Badung				
				9	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Forum Kelitbangan	-	1 kegiatan	661.29	1 kegiatan	793.55	1 kegiatan	912.58	1 kegiatan	3453.21	Balitbang	Kab. Badung			
				10	Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Terbentuknya Majelis Kelitbangan Kabupaten Badung	-	4 dokumen	1,846.64	4 dokumen	2,215.97	4 dokumen	2,326.77	1 dokumen	9073.02	Balitbang	Kab. Badung			
				11	Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Terbentuknya Tim Kelitbangan	-	1 tim	1,245.73	1 tim	1,494.88	1 tim	1,793.85	1 tim	5972.27	Balitbang	Kab. Badung			
				12	Kajian dan Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	186.96	Balitbang	Kab. Badung			
				13	Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	254.51	Balitbang	Kab. Badung			
				14	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 dokumen	635.01	1 dokumen	762.01	1 dokumen	914.41	1 dokumen	2,846.45	Balitbang	Kab. Badung			
				15	Survey Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 dokumen	384.03	1 dokumen	460.84	1 dokumen	553.00	1 dokumen	1,784.96	Balitbang	Kab. Badung			
				16	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 dokumen	99.70	1 dokumen	119.64	1 dokumen	143.57	1 dokumen	478.74	Balitbang	Kab. Badung			
				17	Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	162.69	Balitbang	Kab. Badung			
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama		18	Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang Oleh Pemerintah Kepada Desa Adat dan Kelompok Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	308.76	Balitbang	Kab. Badung				
				19	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 dokumen	500.09	1 dokumen	600.11	1 dokumen	720.13	1 dokumen	2,250.16	Balitbang	Kab. Badung			
				20	Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	235.64	Balitbang	Kab. Badung			
				21	Kajian Sistem Perparkiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta selatan	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	216.33	Balitbang	Kab. Badung			
				22	Kajian Pemanfaatan dan Mangrove Menjadi Bahan Minuman Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	149.96	Balitbang	Kab. Badung			
				23	Kajian Penentuan Area potensi Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi Fish Go di Perairan Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	75.00	Balitbang	Kab. Badung			
				24	Study kelayakan Investasi Hotel di Desa Kutuh, Kecamatan Selatan, Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	156.79	Balitbang	Kab. Badung			
				25	Pilot project Penerapan aplikasi Fish Go untuk Nelayan di desa Pererenan, Kecamatan Mengwi dan desa Kedonganan, Kecamatan Kuta	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 dokumen	524.19											
Diusulkan Dengan Balitbang Tahun 2016-2021																				

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target (Tahun 2021)						
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Pembinaan Renstra Balitbang Tahun 2016-2021				27	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	173.03											
				28	Kajian Persepsi Masyarakat Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	333.47											
				29	Penelitian Potensi Pajak Hotel dan restoran sebagai Pendapatan Asli Berkelanjutan di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	325.69											
				30	Studi Kelayakan Pendirian Umum daerah Parkir Kabupaten	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	192.18											
				31	Kajian Rumusan Model Dampak Kontemporer	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	199.90											
				32	Kajian di Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	450.00				1 dokumen	450.00				
				33	Penelitian di Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	465.00				1 dokumen	465.00				
				34	Pengembangan di Bidang	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	450.00				1 dokumen	450.00				
				35	Survey di Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	485.00				1 dokumen	485.00				
				36	Kajian di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	450.00				1 dokumen	450.00				
				37	Penelitian di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	485.00				1 dokumen	485.00				
				38	Pengembangan di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	480.00				1 dokumen	480.00				
				39	Survey di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	450.00				1 dokumen	450.00				
				40	Kajian di Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	495.00				1 dokumen	495.00				
				41	Penelitian di Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	460.00				1 dokumen	460.00				
				42	Pengembangan di Bidang Sosial	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	480.00				1 dokumen	480.00				
				43	Survey di Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	495.000				1 dokumen	495.00				
				44	Kajian di Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	490.00				1 dokumen	490.00				
				45	Penelitian di Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	470.00				1 dokumen	470.00				
				46	Pengembangan di Bidang	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	455.00				1 dokumen	455.00				
				47	Survey di Bidang infrastruktur	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	480.00				1 dokumen	480.00				
				32	Kajian di Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	485.00	1 dokumen	485.00		
				33	Penelitian di Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	465.00	1 dokumen	465.00		
				34	Pengembangan di Bidang	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	475.00	1 dokumen	475.00		
				35	Survey di Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	490.00	1 dokumen	490.00		
				36	Kajian di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	495.00	1 dokumen	495.00		
				37	Penelitian di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	475.00	1 dokumen	475.00		
				38	Pengembangan di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	450.00	1 dokumen	450.00		
				39	Survey di Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	450.00	1 dokumen	450.00		
				40	Kajian di Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	480.00	1 dokumen	480.00		
				41	Penelitian di Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	460.00	1 dokumen	460.00		
				42	Pengembangan di Bidang Sosial	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	475.00	1 dokumen	475.00		
				43	Survey di Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	455.000	1 dokumen	455.00		
				44	Kajian di Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	490.00	1 dokumen	490.00		
				45	Penelitian di Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	450.00	1 dokumen	450.00		
				46	Pengembangan di Bidang	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	450.00	1 dokumen	450.00		
				47	Survey di Bidang infrastruktur	Jumlah dokumen yang tersusun								1 dokumen	465.00	1 dokumen	465.00		

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis Kelitbangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK	Jumlah inovasi dan pembangunan IPTEK yang dikembangkan	28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	6 inovasi dan pengembangan	2,428.55	8 inovasi dan pengembangan	1,557.08	10 inovasi dan pengembangan	1,712.79	10 inovasi dan pengembangan	7,171.76	Balitbang	
				1 Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung	Terwujudnya penghargaan IPTEK kategori kreatifitas dan inovasi masyarakat	0						3 kelompok / perorangan	171.620	Balitbang	Kab. Badung	
				2 Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembinaan dan Penghargaan IPTEKS	0	3 kelompok	344.070	3 kelompok	378.477	3 kelompok	416.325	12 kelompok	1,453.468	Balitbang	Kab. Badung
				3 Festival Inovasi di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Festival Inovasi	0	3 katagori jenjang pendidikan	696.260	3 katagori jenjang pendidikan	765.886	3 katagori jenjang pendidikan	842.475	3 katagori jenjang pendidikan	2,712.105	Balitbang	Kab. Badung
				4 Innovative Government Award (IGA)	Terlaksananya Innovative Government Award (IGA)	0	38 PD	66.340	38 PD	72.974	38 PD	80.271	38 PD	219.585	Balitbang	Kab. Badung
				5 Mangupura Award	Jumlah Kategori Penilaian	0	4 Katagori	1,013.020					2 Kategori	1,504.619	Balitbang	Kab. Badung
				6 Sayembara Logo Magupura Award	Terlaksananya Sayembara pembuatan Trofi Utama	0							1 Kali	88.038	Balitbang	Kab. Badung
				7 Rood Map Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDA) Kabupaten Badung	Terlaksananya Rood Map Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDA)	0	38 PD	308.860	38 PD	339.746	38 PD	373.721	1 Kali	1,022.327	Balitbang	Kab. Badung

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis Kelitbangan	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
			04	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		3,382.47		9,093.51		10,682.90		11,066.39		12,369.45		46,594.73					
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		3,382.47		9,093.51		10,682.90		11,066.39		12,369.45		46,594.73					
			26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	0	50,50%	3,210.85	55,00%	7,076.72	60,00%	9,618.37	65,00%	9,895.41	70,00%	11,081.37	70,00%	40,882.71	Balitbang		
			1	Up Date Analisis Standar Belanja	Jumlah Analisis Standar Belanja	-	40 jenis ASB	524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 jenis ASB	524.00	Balitbang	Kab. Badung	
			2	Kajian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 dokumen	52.46	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	52.46	Balitbang	Kab. Badung	
			3	Penelitian Dampak Kegiatan Pariwisata Pada Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata Unggulan di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 dokumen	149.31	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	149.31	Balitbang	Kab. Badung	
			4	Kajian Pembentukan Holding Company di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	1 buah	248.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1 buah	248.67	Balitbang	Kab. Badung	
			5	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten badung	-	65 buku	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 buku	275.00	Balitbang	Kab. Badung	
			6	Festival Innovation (INOFEST) Kabupaten Badung	Terselenggaranya innovation festival (Inofest)	-	3 katagori jenjang pendidikan	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 katagori jenjang pendidikan	135.00	Balitbang	Kab. Badung	
			7	Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis Komoditi ayam Ras Petelur di Kec. Petang	Terlaksananya Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis Komoditi ayam Ras Petelur di Kec. Petang	-	1 paket	138.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	138.16	Balitbang	Kab. Badung	
			8	Study Kelayakan Pengembangan Green House di Kab. Badung	Terlaksananya Study Kelayakan Pengembangan Green House di Kab. Badung	-	1 paket	138.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	138.16	Balitbang	Kab. Badung	
			9	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Forum Kelitbangan	-	10 kali	386.55	10 kali	699.24	1 kegiatan	804.13	1 kegiatan	924.75	1 kegiatan	1,063.46	1 kegiatan	3878.13	Balitbang	Kab. Badung	
			10	Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Terbentuknya Majelis Kelitbangan Kabupaten Badung	-	1 dokumen	976.26	4 dokumen	2,211.63	4 dokumen	2,322.22	4 dokumen	2,554.44	4 dokumen	2,682.16	1 dokumen	10746.71	Balitbang	Kab. Badung	
			11	Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Terbentuknya Tim Kelitbangan Kabupaten Badung	-	1 tim	187.26	1 paket	1,006.17	1 tim	1,207.41	1 tim	1,448.89	1 tim	1,738.66	1 tim	5588.39	Balitbang	Kab. Badung	
			12	Kajian dan Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-		1 dokumen	186.96								1 dokumen	186.96	Balitbang	Kab. Badung	
			13	Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-		1 dokumen	254.51								1 dokumen	254.51	Balitbang	Kab. Badung	
			14	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	Jumlah dokumen yang tersusun	-		1 dokumen	535.01	1 dokumen	642.02	1 dokumen	770.42	1 dokumen	924.50	1 dokumen	2,871.95	Balitbang	Kab. Badung		
			15	Survey Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1 dokumen	387.09	1 dokumen	464.50	1 dokumen	557.40	1 dokumen	668.89	1 dokumen	2,077.88	Balitbang	Kab. Badung		
			16	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1 dokumen	192.85	1 dokumen	231.42	1 dokumen	277.70	1 dokumen	333.24	1 dokumen	1,035.20	Balitbang	Kab. Badung		
			17	Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1 dokumen	162.69	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	162.69	Balitbang	Kab. Badung		
			18	Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang Oleh Pemerintah Kepada Desa Adat dan Kelompok Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1 dokumen	308.76	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	308.76	Balitbang	Kab. Badung		
			19	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1 dokumen	429.83	1 dokumen	515.79	1 dokumen	618.95	1 dokumen	742.74	1 dokumen	2,307.32	Balitbang	Kab. Badung		
20	Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-		1 dokumen	235.64							1 dokumen	235.64	Balitbang	Kab. Badung					
21	Kajian Sistem Perparkiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta selatan	Jumlah dokumen yang tersusun	-		1 dokumen	216.33							1 dokumen	216.33	Balitbang	Kab. Badung					

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				22 Penelitian Olahan Biji Mangrove	Jumlah dokumen yang tersusun	-			1 dokumen	250.00							1 dokumen	250.00	Balitbang	Kab. Badung
				23 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pembentukan Holding Company di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-					1 dokumen	150.00					1 dokumen	150.00	Balitbang	Kab. Badung
				24 Penyusunan Analisis Standar Belanja	Jumlah Analisis Standar Belanja	-			-	-	20 Jenis	385.00			20 Jenis	423.50	40 Jenis	808.50	Balitbang	Kab. Badung
				25 Kajian Pengembangan Potensi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-			1 dokumen	270.27	-	-	-	-	1 dokumen	270.27	Balitbang	Kab. Badung
				26 Kajian Penataan dan Pemanfaatan Ruang Permukiman di Kawasan Kota Mangupura	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-			1 paket	350.00	-	-	-	-	1 dokumen	350.00	Balitbang	Kab. Badung
				27 Kajian Pengembangan Fasilitas, Teknologi Pengolahan Limbah Padat, Cair dan B3 di kabupaten badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-			1 dokumen	400.00	-	-	-	-	4 dokumen	400.00	Balitbang	Kab. Badung
				28 Kajian Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-			1 dokumen	417.116					1 dokumen	417.116	Balitbang	Kab. Badung
				29 Kajian Pengembangan Desain Tenun Lokal di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-			1 dokumen	200.00	-	-	-	-	1 dokumen	200.00	Balitbang	Kab. Badung
				30 Penelitian Sinergitas Pertanian dan perikanan Dengan pariwisata di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-			1 dokumen	400.00	-	-	-	-	1 dokumen	400.00	Balitbang	Kab. Badung
				31 Kajian Konsep Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-			1 paket	450.00	-	-	-	-	1 dokumen	450.00	Balitbang	Kab. Badung
				32 Penyusunan Naskah Akademis dalam rangka Penyusunan Peraturan Derah	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Paket	158.50	1 Paket	190.20	1 Paket	228.24	1 paket	576.94	Balitbang	Kab. Badung
				33 Kajian Rumusan Model dan Dampak Pertanian Kontemporer dan Pertanian Perkotaan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.00					1 dokumen	250.00	Balitbang	Kab. Badung
				34 Kajian Model Pengembangan Kapasitas UMKM di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-							1 dokumen	182.50			1 dokumen	182.50	Balitbang	Kab. Badung
				35 Kajian Dampak Penambahan Jumlah Penduduk terhadap Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	0	-	0	-			1 Dokumen	350.00		-	0	350.00	Balitbang	Kab. Badung
				36 Kajian Pemanfaatan Pengolahan Air Limbah di Kawasan Badung Selatan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	0	-	0	-			1 dokumen	350.00		-	0	350.00	Balitbang	Kab. Badung
				37 Kajian Peran Lembaga Adat/ Tradisional Sebagai Wadah Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-			1 dokumen	364.36	-	-	1 dokumen	364.36	Balitbang	Kab. Badung
				38 Kajian Eksistensi Subak yang dipadukan dengan Kondisi Kekinian	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	450.00			1 dokumen	450.00	Balitbang	Kab. Badung
				39 Kajian Pengembangan Potensi Bidang usaha yang Menghasilkan Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	495.80			1 dokumen	495.80	Balitbang	Kab. Badung
				40 Kajian Peningkatan Minat Generasi M Untuk Menekuni Usaha Pertanian	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	360.00			1 dokumen	360.00	Balitbang	Kab. Badung
				41 Kajian Restrukturisasi Pendidikan Dasar Berbasis Hindu	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	375.97	1 dokumen	375.97	Balitbang	Kab. Badung
				42 Kajian peran lembaga pendanaan tradisional (LPD), BUMDes, dan koperasi untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	300.00	1 dokumen	300.00	Balitbang	Kab. Badung
				43 Mengkaji dampak penerapan zonasi di bidang pendidikan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.00	1 dokumen	250.00	Balitbang	Kab. Badung
				44 Mengkaji pengadaan fasilitas Pusat Kajian Hindu Dunia.	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	350.00	1 dokumen	350.00	Balitbang	Kab. Badung
				45 Melakukan studi kelayakan pembangunan BLK.	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	350.00	1 dokumen	350.00	Balitbang	Kab. Badung
				46 Mengevaluasi dampak keberadaan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	400.00	1 dokumen	400.00	Balitbang	Kab. Badung

Penyusunan Renstra Balitbang Tahun 2016-2021

5

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya kebijakan Pembangunan berbasis Kelitbangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK	Jumlah inovasi dan pembangunan IPTEK yang dikembangkan	28	fasilitas penduduk lansia terhadap kualitas hidup para lansia.																
				47 Mengkaji pembentukan (atau mengevaluasi kinerja) Badan Promosi Pariwisata Daerah.	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.00	1 dokumen	250.00	Balitbang	Kab. Badung	
				PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	2 inovasi dan pengembangan	171.62	4 inovasi dan pengembangan	2,016.80	6 inovasi dan pengembangan	1,064.53	8 inovasi dan pengembangan	1,170.98	10 inovasi dan pengembangan	1,288.08	10 inovasi dan pengembangan	5,712.01	Balitbang	
				1 Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung	Terwujudnya penghargaan IPTEK kategori kreatifitas dan inovasi masyarakat	0	3 kelompok / perorangan	171.62									3 kelompok / perorangan	171.620	Balitbang	Kab. Badung
				2 Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembinaan dan Penghargaan IPTEKS	0			3 kelompok	314.596	3 kelompok	346.056	3 kelompok	380.661	3 kelompok	418.727	12 kelompok	1,460.040	Balitbang	Kab. Badung
				3 Festival Inovasi di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Festival Inovasi	0			3 katagori jenjang pendidikan	505.886	3 katagori jenjang pendidikan	556.475	3 katagori jenjang pendidikan	612.122	3 katagori jenjang pendidikan	673.335	3 katagori jenjang pendidikan	2,347.818	Balitbang	Kab. Badung
				4 Innovative Government Award (IGA)	Terlaksananya Innovative Government Award (IGA)	0			38 PD	162.000	38 PD	178.200	38 PD	196.020	38 PD	536.220	Balitbang	Kab. Badung		
5 Mangupura Award	Jumlah Kategori Penilaian	0			2 Kategori	1,121.03							2 Kategori	1,121.026	Balitbang	Kab. Badung				
				5 Sayembara Logo Magupura Award	Terlaksananya Sayembara pembuatan Trofi Utama	0			1 Kali	75.29							1 Kali	75.288	Balitbang	Kab. Badung

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD 2016-2021

Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, diperoleh indikator kinerja utama yang mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Badung serta indikator kinerja utama sebagai acuan untuk melaksanakan Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, dapat diuraikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Badung
yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana 2016-2021

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera							
DAMAI							
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	0'	82.00	82.40	82.80	83.50
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)							
Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75.61	75.74	75.87	76.00	76.13
MAJU							
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi							
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	78	79	80	81	82
SEJAHTERA							
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan							
Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80.3	80.8	81.3	81.8	82.3
	2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	0	71.5	72.5	73.5	74.5

BAB VII PENUTUP

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD SB Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

BAB VII PENUTUP

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD SB Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN
BADUNG,



I WAYAN SUAMBARA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631025 198810 1 002